

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA BARANG DAN JASA DENGAN *BUDGET
RATCHETING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

MARIANI
17043018

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
BARANG DAN JASA DENGAN *BUDGET RATCHETING* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI

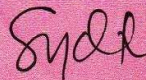
(*Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2016-2019*)

Nama : Mariani
NIM/TM : 17043018/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintahan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Disetujui Oleh :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE., M.Si.
NIP. 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi (*Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019*)

Nama : Mariani

NIM/TM : 17043018/2017



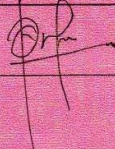
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Pemerintahan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vita Fitria Sari, SE., M.Si.	1. 
2	Anggota	Mayar Afrienti, SE., M.Sc.	2. 
3	Anggota	Halmawati, SE., M.Si.	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariani
NIM/Tahun Masuk : 17043018/2017
Tempat/Tgl.Lahir : Gumpang, 13 Januari 1999
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintahan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Cendrawasih No.10B, Air tawar Barat Padang
Utara
No.HP/Telp : 082291371449/-
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai
Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akadeik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2022
Yang Menyatakan



Mariani

17043018/2017

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
BARANG DAN JASA DENGAN *BUDGET RATCHETING*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019)**

Mariani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus Air Tawar Padang

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja barang dan jasa (b) mengetahui Ratcheting budget dalam mempengaruhi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Barang dan Jasa. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD dan LRA Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan time series tahun 2016-2019 yang diperoleh dari djpk.kemenkeu.go.id. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,689 > 1,666$ dan nilai signifikan sebesar $0,448 > 0,05$ maka dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa. Kemudian hasil pengujian pada Budget Ratcheting mengalami penurunan pada Adjusted R Square dari 42,4% pada regresi pertama menjadi 41,3% pada regresi kedua. Maka dapat dikatakan bahwa Budget Ratcheting memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Barang dan Jasa.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, *Budget Ratcheting*, belanja barang dan jasa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu WaTa'ala kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019)”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu'alaihiWassallam yang telah menjadikan suritauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagimasyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Penulis secara pribadi mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pertama dan teristimewa penulis hadiahkan kepada keluarga tercinta, Ama Syamsiruddin, Ine Sakdiah, kak Kul, Kak Lah dan adik Win, serta keluarga besar di Gayo Lues dan keluarga besar di Aceh yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa berjuang agar bisa membuat kebahagiaan

dan kebanggaan untuk kita bersama. Terimakasih atas kesungguhan do'a dan bantuan moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan Akuntansi sekaligus Pembimbing Skripsi penulis yang telah menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi Terimakasih ibu atas masukan dan saran dari ibu yang sangat bermanfaat selama diperkuliahan dan saat bimbingan, insyaAllah akan Ani implementasikan untuk kedepannya ibu.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Vanica Serly selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis, dan telah banyak memberi nasihat, ilmu, serta banyak membantu dalam hal apapun selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ibu Mayar Afrienti, SE., M,Sc dan ibu Halmawati SE, M.Si selaku dosen penguji penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang

bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan

8. Terimakasih kepada sahabat penulis di Gayo Lues, Kurnia dan masyitah yang selalu menantikan kepulangan penulis, tempat penulis berkeluh kesah dalam hal sekecil apapun dan selalu ada untuk menemani penulis sampai saat ini.
9. Keluarga Musarami, Indonesian bakery dan kos Srikandi, sebagai keluarga kedua bagi penulis selama berada di Padang. Sahabat di Padang Boru Batak Zulfahira Simatupang yang menjadi tutor akuntansi yang unlimited dalam segala hal untuk tempat bertanya sealama dalam drama penskripsian ini. Dan juga sahabat iros, ulan, febe, ulik yang selalu ada saat penulis lelah dengan semua ini. Terima Kasih telah mau berteman dengan ani selama di Padang. Semangat untuk kita semua dan semoga cita-cita kita bisa sukses dan menggapai cita-cita. Aamiin Allahummaaamiin.
10. Teruntuk support system penulis dalam menyelesaikan skripsi, Rafli dan Caca. Terimakasih banyak karena selalu memberikan dukungan dan bantuan saat penulis mengalami kesulitan dalam menulis skripsi. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua.
11. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi serta kawan-kawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2017 dan juga senior dan junior yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih ada kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk

perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUALDAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Objek Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel Penelitian	31
C. jenis,Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
D. Devenisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	33
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Barat.....	41
B. DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN	43
C. HASIL PENELITIAN	49
D. PEMBAHASAN	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Keterbatasan.....	67
C. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1. Populasi dan Sampel.....	32
Tabel 4.1. Prosedur Penentuan Data.....	43
Tabel 4.2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.....	44
Tabel 4.3. Belanja Barang dan Jasa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.....	46
Tabel 4.4. <i>Budget Ratcheting</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.....	48
Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.10. Hasil Estimasi Analisis Regresi Sederhana.....	54
Tabel 4.11. Hasil Estimasi <i>Moderating Regression Analysis</i>	55
Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa.....	57
Tabel 4.13. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah, <i>Budget Ratcheting</i> dan Pendapatan Asli Daerah x <i>Budget Ratcheting</i> terhadap Belanja Barang dan Jasa.....	57
Tabel 4.14. Hasil Uji F.....	58
Tabel 4.15. Hasil Uji Statistik t.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	30
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Barang dan Jasa 71
2. Data Tabulasi 74

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang diselenggarakan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan secara aktif, selain itu pemerintah daerah juga dituntut mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut pemerintah daerah harus melakukan penyusunan anggaran dengan sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan operasional serta pengelolaan terhadap sumber daya keuangan yang mereka miliki.

Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan keputusan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain (Basri, 2013). Dalam organisasi yang berorientasi laba, penyusunan anggaran seringkali diartikan sama dengan perencanaan laba, sedangkan dalam organisasi yang tidak berorientasi terhadap laba seperti sektor publik, penyusunan anggaran menekankan pada penggunaan atau alokasi sumberdaya keuangan yang dimiliki (Suryanto &

Kurniati, 2020). Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan dalam sistem penganggaran sektor publik telah mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam sistem penganggaran sektor publik diatur oleh undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan penjelasan bahwasannya rencana kerja dan anggaran disusun didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang dicapai. Sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia pada saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran (input) saja, akan tetapi sudah didasarkan pada hasil kinerja yaitu output dan outcome dari penggunaan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya.

Sistem penganggaran yang digunakan tersebut disebut dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran ini diterapkan pada pemerintahan di Indonesia sebagai bentuk upaya untuk reaksi dari adanya tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa transparansi, dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Hal tersebut telah memberikan dorongan kepada pemerintah agar melakukan penyusunan anggaran dengan cermat, akurat dan sistematis. Penyusunan suatu rencana kinerja dalam konteks penyusunan anggaran berbasis kinerja berhubungan dengan rencana strategis (renstra). Rencana strategis (renstra) adalah suatu aktivitas yang menunjukkan dimana organisasi tersebut berada, kemana arah organisasi harus tertuju dan bagaimana cara (strategi) yang digunakan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Renstra disusun untuk dijalankan selama lima tahun.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja harus bisa menunjukkan tujuan dari adanya pengeluaran yang dianggarkan dan juga bisa menunjukkan biaya dari program yang diusulkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta ukuran dari hasil pada setiap program yang diajukan tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut, pengelola organisasi akan senantiasa mampu memastikan tingkat kesesuaian anggaran aktual sehingga realisasi anggaran akan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan (Sofyani & Prayudi, 2018). Suatu penerapan anggaran berbasis kinerja dapat terlaksanakan apabila dalam penyusunan anggaran tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang tersedia yaitu *clear, relevant, economic, adequate* dan *monitorable*. Varian anggaran organisasi pemerintah menyediakan informasi mengenai kapasitas kinerja dan capaian target kinerja serta kesesuaian alokasi anggaran dengan target iuran program yang ditetapkan pemerintah. (Indra 2018:70) mengatakan bahwa anggaran berbasis kinerja menunjukkan hubungan antara biaya/belanja (*input*) dengan hasil/pendapatan (*outcome*) yang direncanakan. Dalam proses pembangunan daerah tentu membutuhkan alokasi dana yang cukup besar sehingga alokasi Belanja Daerah pun semakin meningkat.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 3 jenis belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Dalam belanja operasi terdapat belanja barang dan jasa yang merupakan belanja yang rentan terhadap penyimpangan, karena barang yang diperoleh mudah untuk dipindah tangankan dan pertanggungjawabannya mudah dilakukan. Perubahan anggaran belanja barang dan jasa bersifat strategis dan penting karena menjadi

alternatif untuk menghabiskan anggaran, sementara perubahan belanja modal harus dibatasi karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Belanja barang dan jasa memiliki peranan yang sangat penting guna peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan publik untuk masyarakat. Belanja Barang dan Jasa merupakan salah satu anggaran yang pengeluarannya cukup besar dibandingkan dengan belanja yang lainnya. Oleh karena itu Belanja Barang dan Jasa dijadikan sebagai variabel *dependent* pada penelitian ini.

Belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki porsi 38,8%, hal tersebut menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan belanja lainnya. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/Pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, kendaraan bermotor cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwasanya belanja barang dan jasa merupakan komponen belanja yang merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan asli daerah, sehingga besar kecilnya alokasi untuk penganggaran belanja barang dan jasa ditentukan dan dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah. Untuk membangun daerah dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Pendapatan asli daerah yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama dan penerimaan yang kuat yang dipergunakan sebagai pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dan akan dinikmati langsung hasilnya oleh masyarakat. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan agar daerah dapat menutupi pengeluaran dan belanja yang dilakukan untuk kesejahteraan daerah. Pengelolaan sumber PAD oleh Pemerintah Daerah yang semakin baik akan menjamin ketersediaan sumber pendanaan Belanja Daerah yang dapat digunakan dalam menjalankan

roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD yang semakin meningkat dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang lebih produktif, termasuk Belanja Barang dan Jasa. Semakin meningkat PAD mengindikasikan bahwa anggaran Belanja Barang dan Jasa juga ikut meningkat (Syofya dan Gustomi, 2020:77).

Besaran alokasi anggaran yang ditentukan untuk periode berikutnya biasanya dilakukan dengan melihat kinerja anggaran yang dijadikan sebagai basis penilaian prestasi manajemen. Penentuan anggaran pada periode berikutnya ditentukan berdasarkan penggunaan anggaran yang menggambarkan konteks yang menandakan inkrementalisme atas anggaran. Inkrementalisme disini mempunyai asosiasi negatif apabila pada anggaran yang ada pada periode sebelumnya memiliki bias. Dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya perilaku oportunistik pada penyusunan anggaran yang berbentuk penciptaan senjangan (*slak*) anggaran dan *ratchet Budgeting*. Adanya hal tersebut telah menyebabkan adanya penurunan kapasitas terhadap kinerja, sehingga menyebabkan kesulitan terhadap pengukuran tingkat kinerja riil manajemen. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan anggaran yang ada akan menjadi kaku sehingga mengakibatkan adanya ketidak efisienan dalam pertumbuhan anggaran (Sari et al., 2020)

Penelitian Nurhayati (2018) mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara varians anggaran (perbedaan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan) periode berjalan dengan anggaran periode berikutnya. Penggunaan varians ini sebagai dasar dalam penetapan target

selanjutnya disebut *budget ratcheting*. *Budget ratcheting* menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendapatan periode berikutnya cenderung lebih responsif terhadap varian anggaran pendapatan periode berjalan dibandingkan penurunan pendapatan pada periode berikutnya sebagai berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran periode berjalan. Artinya, kekurangan dalam pendapatan periode berjalan tidak terkait dengan tinggi rendahnya pendapatan di masa mendatang (Lim, 2011 dalam Abdullah 2015).

Safitri dan sari (2020) menyatakan bahwa, *budget ratcheting* terjadi pada penganggaran pendapatan asli daerah yang mengakibatkan pertumbuhan dalam penganggaran PAD, begitu juga dalam penganggaran belanja daerah juga terdapat *budget ratcheting* yang mengakibatkan peningkatan dalam penganggaran belanja daerah setiap tahunnya. Hal ini berarti *budget ratcheting* dapat menjadi faktor penentu dalam hubungan antara PAD dengan belanja barang dan jasa. *Ratcheting* terjadi sebagai bentuk dari adanya asimetri informasi, dimana antara agent dan principal mendapatkan ketidak seimbangan informasi. *Ratcheting* dalam penganggaran terjadi disebabkan adanya kecendrungan dalam pembuatan perencanaan guna menentukan tujuan di masa depan dengan menggunakan kinerja saat ini (Nurhayati, 2017). Hal ini memiliki makna bahwa pada dasarnya *budget ratcheting* merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merevisi pencapaian target untuk memperoleh gambaran kinerja di masa lalu. *Budget ratcheting* juga merupakan sebuah kecenderungan dalam pembuatan perencanaan guna menentukan tujuan dimasa depan dengan menggunakan kinerja saat ini.

Andreas dan Sari, (2020) mengatakan bahwa *Budget Ratcheting* dalam organisasi sektor publik penting untuk dikaji karena beberapa hal: pertama, *Budget Ratcheting* pada proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah cenderung mengandung adanya perilaku bias penyusunan anggaran yang dapat mempengaruhi anggaran tersebut dari tahun sebelumnya ke tahun depan. Sehingga akibat dari kondisi tersebut pertumbuhan dari anggaran yang tidak efisien dan merugikan kepentingan publik. Kedua, *Budget Ratcheting* akan memperlihatkan bahwa anggaran pada periode selanjutnya mengandung *incrementalism* yang tidak selaras dengan tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan akurasi tahapan perencanaan dan memperkuat aspek akuntabilitas kinerja dalam siklus penganggaran.

Sejalan dengan tujuan penelitian, dengan adanya budget ratcheting maka berkaitan juga dengan hubungan antara pendapatn asli daerah dengan belanja daerah termasuk belanja barang dan jasa. Nurhayati (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah yang di sebabkan karena adanya varians anggaran dari tahun sebelumnya yang terjadi pada wilayah Cirebon. (Sari et al., 2020) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daderah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah, dan *budget ratcheting* memperkuat hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan yang dikemukakan (Abdullah & Junita, 2016) yang tidak mengungkapkan hubungan kuat atau lemah *budget ratcheting* dalam memoderasi hubungan antara pendapatan dengan belanja. Andreas dan Sari, (2020) dalam penelitiannya

mengemukakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan *Budget Ratcheting* memperlemah hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian. (Sari et al., 2020) yang menyatakan adanya hubungan kuat antara PAD dengan belanja melalui moderasi *Budget Ratcheting*.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan pencapaian yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan dilakukannya berbagai pembangunan baik dalam bentuk sektor pariwisata daerah dan sektor publik lainnya (Annisa, 2020). Pada sisi pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8% per tahun selama kurun waktu 2016-2019 begitu juga dengan sisi pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan 11%. PAD Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp3,646,986,353,089 pada tahun 2016 menjadi Rp4,426,443,171,491 pada tahun 2019. Perkembangan yang terjadi pada komponen pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Barat mengindikasikan bahwa anggaran pemerintah disisi pendapatan cenderung *underforecast*.

Belanja Barang Dan Jasa Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan rata-rata 12% per tahun selama kurun waktu 2016-2019. Belanja barang dan jasa pada tahun 2016 sebesar Rp5.101.869,389,938 menjadi Rp7.062.635.039.807 pada tahun 2019. Namun realisasi belanja barang dan jasa mengalami fluktuasi dari anggaran yang direncanakan. Dimana pada tahun

2016 dan 2017 nilai realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa mencapai sebesar 94,55% dan 105,18% sementara pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan realisasi anggaran menjadi 98,64% dan 96,43%, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dan 2019 yang berjalan tidak optimal. Situasi ini mengindikasikan bahwa capaian realisasi anggaran memerlukan peningkatan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa dengan budget ratcheting mempengaruhi hubungan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja barang dan jasa melalui budgeget ratcheting sebagai variabel moderasi. Sehingga judul penelitian yang diangkat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Barat tahun 2016-2019?

2. Apakah *budget reching* berpengaruh terhadap hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja barang dan jasa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui apakah *Budget Ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Barang dan Jasa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *Budget Ratcheting*. Selain itu, penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai sarana dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini khususnya mengenai *Budget Ratcheting* dalam sektor pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *Budget Ratcheting* memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja

Barang dan Jasa, sehingga berguna bagi Pemerintah Daerah dalam menilai kinerja pemerintahannya guna meningkatkan kinerjanya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan tentang adanya konflik antara pemilik selaku *principal* dengan manajemen selaku *agent*. Andrean dan Sari, (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pemilik ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan.

Teori keagenan yang diterapkan dalam perusahaan tidak jauh berbeda dengan penerapannya dalam organisasi sektor publik. Pada sektor publik, hubungan keagenan dapat terjadi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang melibatkan antara legislatif dan eksekutif (Andrean dan Sari, 2020) Legislatif (*principal*) selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam kapasitasnya mendelegasikan wewenang pemerintahan kepada eksekutif (*agent*) selaku Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang diperuntukan demi kepentingan rakyat. Masalah keagenan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terjadi pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah yang merasa memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan